



Analisis Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Belanja Modal di Provinsi Aceh

Farid Alfasyah^{1*}, Puti Andiny², Yani Rizal³, Safuridar Safuridar⁴

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Samudra, Langsa Aceh, Indonesia

faridalfasyah2021@gmail.com^{1*}, putiandiny@unsam.ac.id², yanirizal@unsam.ac.id³, safuridar@unsam.ac.id⁴

Alamat: Jalan Prof Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh Tengah, Langsa – Aceh, Indonesia

Korespondensi penulis: faridalfasyah2021@gmail.com*

Abstract. *This study analyses the influence of fiscal capacity on capital expenditure in Aceh Province over the period 2007-2023 by collecting data from the BPS website of Aceh Province. Using multiple linear regression method, this study found that Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Fund (DBH), and Special Allocation Fund (DAK) have a positive and significant influence on capital expenditure. The results of the analysis show that every 1 unit increase in PAD, DBH, and DAK respectively increases capital expenditure by 234.0927 units, 57.51575 units, and 25.09292 units. This finding indicates that stronger fiscal capacity allows local governments to allocate more budget for infrastructure and investment projects, which support economic development and community welfare. Increased personnel expenditure was also found to have a significant positive impact on capital expenditure, indicating the importance of investment in human resources to support the efficiency and effectiveness of managing development projects. These results support the Human Capital and Administrative Efficiency theories, which assert that competent and efficient human resources increase productivity in budget management*

Keywords: *Regional Original Revenue, Revenue Sharing Fund, Special Allocation Fund, Employee Expenditure, Capital Expenditure*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh kapasitas fiskal terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Aceh selama periode 2007-2023 dengan pengumpulan data dari situs BPS Provinsi Aceh. Menggunakan metode regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada PAD, DBH, dan DAK secara berturut-turut meningkatkan belanja modal sebesar 234.0927 unit, 57.51575 unit, dan 25.09292 unit. Temuan ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal yang lebih kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk proyek infrastruktur dan investasi, yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja pegawai juga ditemukan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja modal, menunjukkan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek pembangunan. Hasil ini mendukung teori *Human Capital* dan *Administrative Efficiency*, yang menegaskan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan efisien meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan anggaran.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Belanja Pegawai, Belanja Modal

1. LATAR BELAKANG

Provinsi Aceh, dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonominya, menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek krusial dalam pengelolaan tersebut adalah kapasitas fiskal, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban belanja. Kapasitas fiskal yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan

mengalokasikan anggaran secara efektif, termasuk untuk belanja modal yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daerah yang mungkin mengalami kekurangan dana diberi bantuan dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan. Akan tetapi tujuan pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang kuat dalam menghasilkan kemandirian di suatu daerah.

Belanja modal menjadi elemen vital dalam anggaran daerah, karena mencerminkan komitmen pemerintah untuk berinvestasi dalam pembangunan jangka panjang. Di Aceh, kebutuhan akan infrastruktur yang memadai semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kapasitas fiskal mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal. Hal ini menjadi fokus dari penelitian ini, yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kapasitas fiskal dan anggaran belanja modal di Provinsi Aceh.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin adanya campur tangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 tahun 2004 menjelaskan pula bahwa pemberian otonomi kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkat otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Seiring dengan regulasi tersebut, pemerintah daerah dituntut dapat mendayagunakan sumber daya dan potensi daerah untuk tujuan pembangunan daerah melalui pengelolaan APBD yang efektif dan produktif dengan mengurangi belanja konsumtif, meningkatkan PAD dan memperbesar alokasi belanja modal guna mendorong percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*Sumardjoko, 2017*).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai upaya upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiensi penggunaan keuangan negara, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui konsep partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (*Surtikanti, 2004*). Melalui otonomi daerah, diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkat daya saing antar daerah dengan memperhatikan unsur pemerataan, demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nordiawan, 2006).

Tabel 1. Porsi Belanja Pegawai dan Belanja Modal Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2019 s/d 2023 (dalam ribu rupiah)

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah	Belanja Pegawai		Belanja Modal	
			Nominal	%	Nominal	%
2019	15.752.800.901,65	12.449.621.461,07	2.534.903.694,20	12,54	3.624.044.113,34	44,73
2020	14.439.920.557,02	15.798.122.413,00	2.823.244.637,48	11,37	2.067.388.450,88	-42,95
2021	13.948.388.273,43	13.682.744.002,49	6.358.293.604,18	125,21	5.125.955.152,31	147,94
2022	13.714.268.728,67	15.773.078.722,04	6.941.056.674,56	9,17	5.977.528.183,01	16,61
2023	10.512.623.288,87	11.354.566.451,84	2.781.799.346,02	-59,92	1.668.913.999,16	-72,08

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan hubungan antara kapasitas fiskal dan alokasi anggaran belanja modal di Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir. Dari tahun 2019, terlihat fluktuasi dalam total pendapatan dan total belanja daerah. Puncaknya terjadi pada tahun 2019 dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 15.752.800.901,65.

Untuk pendapatan daerah mengalami penurunan bertahap, porsi belanja pegawai menunjukkan variasi yang signifikan. Tahun 2019 memiliki presentase belanja pegawai sebesar 12,54%, sedangkan pada tahun 2021 terjadi lonjakan besar menjadi 125,21% yang disebabkan oleh peningkatan jumlah pegawai dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional dan tunjangan pegawai juga menjadi alasan meningkatnya porsi belanja pegawai pada tahun 2022, meskipun sempat mengalami penurunan yang disebabkan adanya efisiensi birokrasi dan pengurangan pegawai atau penyesuaian tunjangan yang lebih efektif.

Belanja modal mengalami variasi yang cukup besar. Pada tahun 2019, belanja modal mencapai peningkatan sebesar 44,73%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar -42,95% yang disebabkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dan prioritas yang diberikan pada proyek-proyek untuk kepentingan public, seperti gedung bangunan, pembangunan jalan dan jaringan irigasi, belanja modal tanah dan belanja modal aset tetap, serta pengadaan peralatan dan mesin. Tahun 2021 menunjukkan peningkatan pesat sebesar 147,94%, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 yang disebabkan oleh peningkatan investasi dalam infrastruktur seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan pengadaan peralatan.

Kapasitas fiskal diukur dari total pendapatan daerah, memiliki pengaruh langsung terhadap anggaran belanja modal. Penurunan pendapatan daerah dari tahun ke tahun menyatakan bahwa hal ini mempengaruhi alokasi belanja modal yang tidak stabil. Penurunan

kapasitas fiskal mengarah pada pemotongan belanja modal, hal ini bisa berdampak pada kemampuan pemerintah dalam melakukan investasi publik dan pembangunan infrastruktur. Fluktuasi yang signifikan dalam belanja pegawai dan belanja modal kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan keuangan yang diterapkan oleh pemerintah provinsi. Perubahan dalam prioritas anggaran dan respon terhadap situasi fiskal mungkin menjadi faktor penyebab utama variasi ini. Analisis dari tabel 1 menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Provinsi Aceh memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggaran belanja modal. Ketidakstabilan pendapatan daerah berdampak pada fluktuasi belanja modal, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah tersebut. Penelitian lebih lanjut dan analisis mendalam dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang hubungan antara kapasitas fiskal dan alokasi anggaran belanja modal di Provinsi Aceh.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini yaitu : (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal pada Provinsi Aceh periode 2007-2023; (2) Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Anggaran Modal pada Provinsi Aceh periode 2007-2023; (3) Apakah Dana Alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh periode 2007-2023; (4) Apakah Belanja Pegawai (BP) berpengaruh terhadap Belanja Modal Provinsi Aceh periode 2007-2023.

2. KAJIAN TEORITIS

Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan mamfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa mamfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (DJPK, 2013).

Menurut *Halim (2004:73)*, belanja modal merupakan belanja yang mamfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Disisi lain ada anggaran operasional yang biasanya dirancang untuk satu tahun belanja, sementara kebanyakan anggaran modal untuk beberapa periode atau tahun anggaran (*Bland dan Nunn, 1992*).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah,

bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk (*guidance*) dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD. KUA dan PPAS merupakan konkretisasi dari hasil konsep *Multi-Term Expenditure Framework (MTEF)* menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka *panjang* (Allen dan Tommasi, 2001).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2004). Dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang dikutip berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Pada pasal 3, disebutkan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut *Mardiasmo (2002)* saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat.

Diharapkan bahwa dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima untuk mendanai pengeluaran modal di wilayahnya. Namun, dalam praktiknya, transfer dari pusat sering kali menjadi sumber utama dana bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari atau pengeluaran daerah. Pengeluaran modal merupakan salah satu komponen dari pengeluaran daerah yang juga mendapatkan dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan dan sesuai dengan prioritas nasional (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dana Bagi Hasil

Setiap daerah memiliki pendapatan daerah yang berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan antar daerah, pemerintah pusat mentransfer dana yang disebut dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Yani, 2002:40). Salah satu komponen dana perimbangan adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang bebas digunakan oleh pemerintah daerah, kecuali DBH yang berasal dari bagi hasil cukai tembakau (Abdullah dan Rona, 2014). DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (Wandira, 2013).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, PPh Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21, Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi.

Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan khusus yang sejalan dengan program-program nasional. Dana ini diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan tambahan dana dari pemerintah pusat melalui DAK. Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk dalam pengeluaran Belanja Modal (Sukarna, 2013:43).

Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota, TNI, dan pejabat negara, baik bertugas di dalam negara maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Sumber-sumber pendapatan terus meningkat secara signifikan setiap tahun, belanja pegawai mengalami tren peningkatan cukup signifikan setiap tahun, tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan belanja modal (*Sugiyanta, 2016:76*).

Menurut peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran kementerian Negara/Lembaga Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan-undangan. Termasuk uang makan, lembur, dan honorarium.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikutip dari dokumen laporan Anggaran dan Realisasi APBD dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs www.aceh.bps.go.id. Dari sumber website ini diperoleh data PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Pegawai, dan Belanja Modal di Provinsi Aceh tahun 2007 s/d 2023.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode analisis deskriptif untuk menggambarkan variable X dan Y. Di sisi lain untuk menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggunakan uji t. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda (Gzhozali, 2013) yang dilakukan dengan software perangkat lunak EViews 12. Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik karena untuk mengetahui apakah regresi linier berganda layak digunakan.

Rumus regresi linier sederhana untuk penelitian ini adalah :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DBH + \beta_3 DAK + \beta_4 BP + e$$

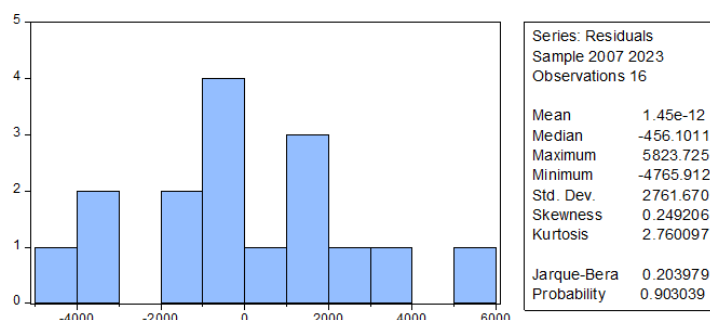
Keterangan : BM : Belanja Modal; α : konstanta; β : Slope atau koefisien regresi atau intersep; PAD : Pendapatan Asli Daerah; DBH : Dana Bagi Hasil; DAU : Dana Alokasi Umum; BP : Belanja Pegawai; e : error.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



Sumber : estimate EViews

Uji normalitas membantu memverifikasi bahwa data memenuhi asumsi ini sehingga hasil analisis dapat diandalkan, jika data atau residuals tidak berdistribusi normal, ini bisa menjadi indikasi bahwa model yang digunakan tidak sesuai atau ada variabel yang hilang. Pada tabel 2 menunjukkan nilai *Jarque-Bera* adalah 0.203979 dengan *Probability* 0.903039. Nilai ini menunjukkan bahwa probabilitas untuk menolak hipotesis nol bahwa residuals berdistribusi normal sangat kecil (lebih besar dari 0.05), sehingga kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut. Dengan kata lain, residuals berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/16/24 Time: 08:07			
Sample: 2007 2023			
Included observations: 16			
	Coefficient	Uncentered	Centered
Variable	Variance	VIF	VIF
C	1417156.	2.180195	NA
PAD	3738.277	1.915233	1.054412
DBH	628.2981	1.167187	1.010194
DAK	75.25256	1.221163	1.033427
BP	488.7391	1.248735	1.080053

Sumber : estimate EViews

Secara keseluruhan, nilai VIF terpusat untuk semua variabel berada di bawah 0.10, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model ini. Dengan kata lain, variabel-variabel independen dalam model tidak korelasi tinggi satu sama lain, sehingga hasil regresi dapat diandalkan.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.216048	Prob. F(4,11)	0.9240
Obs*R-squared	1.165446	Prob. Chi-Square(4)	0.8838
Scaled explained SS	0.484779	Prob. Chi-Square(4)	0.9750

Sumber : estimate EViews

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menunjukkan bahwa tidak ada bukti heteroskedastisitas dalam model regresi yang diuji. Dengan kata lain, varians dari error terms atau residuals adalah konstan (homoskedastisitas). Hal ini merupakan kondisi yang diharapkan dalam model regresi yang baik, karena memastikan bahwa hasil estimasi parameter dapat diandalkan dan valid.

Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.162157	Prob. F(2,9)	0.8527
Obs*R-squared	0.556504	Prob. Chi-Square(2)	0.7571

Sumber : estimate EViews

Nilai *F-statistic* sebesar 0.162157 dengan probabilitas 0.8527 menunjukkan bahwa kita gagal menolak hipotesis nol (H_0) yang menyatakan tidak ada autokorelasi pada residuals. Probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi umum (0.05) mengindikasikan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya autokorelasi. Nilai *ObsR-squared* sebesar 0.556504 dengan probabilitas 0.7571 juga mendukung hasil *F-statistic*. Probabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa tidak ada bukti signifikan untuk menolak hipotesis nol, yang berarti tidak ada autokorelasi dalam data residual.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: BM				
Method: Least Squares				
Date: 11/16/24 Time: 08:04				
Sample: 2007 2023				
Included observations: 16				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.

C	-3633.377	1190.444	-3.052120	0.0110
PAD	234.0927	61.14145	3.828707	0.0028
DBH	57.51575	25.06588	2.294584	0.0424
DAK	25.09292	8.674824	2.892614	0.0146
BP	137.4702	22.10744	6.218276	0.0001
R-squared	0.887566	Mean dependent var		3033.125
Adjusted R-squared	0.846680	S.D. dependent var		8236.112
S.E. of regression	3224.936	Akaike info criterion		19.24552
Sum squared resid	1.14E+08	Schwarz criterion		19.48695
Log likelihood	-148.9642	Hannan-Quinn criter.		19.25788
F-statistic	21.70870	Durbin-Watson stat		1.425974
Prob(F-statistic)	0.000035			

Sumber : estimate EViews

Uji Parsial (Uji – t)

- PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan nilai Probabilitas (p-value) 0.0110, menunjukkan bahwa PAD signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM).
- DBH (Dana Bagi Hasil) dengan nilai Probabilitas (p-value) 0.0442, menunjukkan bahwa DBH signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM).
- DAK (Dana Alokasi Khusus) dengan nilai Probabilitas (p-value) 0.0146, menunjukkan bahwa DAK signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM).
- BP (Belanja Pegawai) dengan nilai Probabilitas (p-value) 0.0110, menunjukkan bahwa BP signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Artinya, BP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM).

Secara Keseluruhan, hasil uji parsial (uji – t) menunjukkan bahwa semua variabel independen (PAD, DBH, DAK, dan BP) berpengaruh signifikan terhadap BM (Belanja Modal).

Uji Simultan (Uji – F)

Nilai Probabilitas (p-value) sebesar 0.000035 yang jauh lebih kecil dari 0.05, Artinya ada bukti kuat bahwa setidaknya satu dari variabel independent secara signifikan mempengaruhi variabel dependen (BM) dalam model regresi ini. Dengan kata lain, model regresi ini signifikan secara statistic dan variabel independent secara Bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *R-squared* (R^2) sebesar 0.887566 menunjukkan bahwa 88.76 % variasi dalam variabel dependen BM dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent (PAD, DBH, DAK, dan BP) dalam model ini. Dengan kata lain variabel-variabel independent yang dipilih sangat relevan dalam menjelaskan perubahan dalam BM. Maka dapat dikatakan model ini valid untuk analisis lebih lanjut.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh dengan nilai *probability* 0.0028 (< 0.05) dan 234.0927 untuk koefisien. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada PAD akan meningkatkan BM sebesar 234.0927 unit. Peningkatan PAD menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang lebih kuat, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk belanja modal sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek investasi lainnya di Provinsi Aceh. Peningkatan PAD selama 2019-2023 berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur utama, termasuk fasilitas umum di daerah pedalaman yang dapat dikatakan bahwa PAD mendukung belanja modal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Aceh. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wagner pada abad ke 19 yaitu, dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Permatasari dan Mildawati (2016), Asmawiah dan Sulistiyo (2022), Aan Widiyanto (2020), Sunita Andriani (2024) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan. Di sisi lain penelitian ini menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Mia Jauhariyah (2022) dengan hasil bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, termasuk belanja modal. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pengalokasian PAD oleh pemerintah yang tidak sesuai serta adanya penyalagunaan anggaran.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh dengan nilai *probability* 0.0442 (< 0.05) dan 57.51575 untuk koefisien. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada DBH akan meningkatkan BM sebesar 57.51575 unit. Peningkatan pendapatan daerah melalui DBH memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk investasi infrastruktur dan proyek pembangunan, mendukung pertumbuhan

ekonomi lokal. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dan transparan, serta dukungan dari pemerintah pusat, memastikan penggunaan DBH yang efisien dan tepat sasaran. Selain itu, DBH berperan penting dalam meningkatkan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aan Widiyanto (2020), Arbie Gugus Wandira (2013), dan Paulus Yudi Hermawan et al. (2021) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal secara simultan maupun parsial dan menolak penelitian Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra (2020) dengan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negative akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Karanganyar, hal ini terjadi karena adanya masalah keagenan. Dimana pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Aceh dengan nilai *probability* 0.0146 (< 0.05) dan 25.09292 untuk keefisien. Artinya, setiap peningkatan 1 unit pada DAK akan meningkatkan BM sebesar 25.09292 unit yang menunjukkan bahwa hubungan antara DAK dan BM bukan kebetulan, melainkan nyata dan dapat diandalkan. DAK sebagai salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal di Provinsi Aceh, sehingga pemerintah perlu terus mengoptimalkan penggunaan DAK untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Palupi dan Sulardi (2018), Rohman dkk (2019), Paramartha dan Budiasih (2016), Azhar dan Suwardi (2017) memberikan hasil serupa bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal, hasil-hasil yang dilakukan oleh peneliti tersebut memberikan bukti kuat bahwa dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam meningkatkan belanja modal. Sedangkan hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galih Putranto (2014) dan Nursita Wulandari Lutpikah dan Denny Mahendra (2020) dengan hasil yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal yang terjadi akibat adanya pengelolaan dana alokasi khusus yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal

Variabel Belanja Pegawai memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap belanja modal dengan nilai *probability* 0.0001 (< 0.05) dan 137.4702 untuk koefisien. Artinya, setiap peningkatan 1 unit BP akan meningkatkan BM sebesar 137.4702 unit. Dari hasil penelitian variabel belanja pegawai ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan teori Human Capital Theory dan Administrative Efficiency Theory yang mengatakan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia meningkatkan kualitas pegawai, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengelolaan proyek-proyek belanja modal dan menurut teori ini, pegawai yang kompeten dan efisien dapat mengelola proyek infrastruktur dengan lebih baik, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas penggunaan dana belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yusuf (2018) menunjukkan bahwa belanja pegawai mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja pemerintah pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Penelitian lainnya yang sejalan dengan hasil penelitian ini adalah penelitian Darwis (2015) dan Wahyuni & Ardini (2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Aceh selama periode 2007 s/d 2023. Hasil analisis membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) secara positif dan signifikan mempengaruhi belanja modal. Hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada PAD, DBH, dan DAK secara berturut-turut meningkatkan belanja modal sebesar 234.0927 unit, 57.51575, dan 25.09292 unit. Ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal yang lebih kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk proyek infrastruktur dan investasi, yang mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peningkatan belanja pegawai juga ditemukan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap belanja modal, dengan setiap peningkatan 1 unit belanja pegawai meningkatkan belanja modal sebesar 137.4702 unit. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan proyek pembangunan. Penelitian ini mendukung teori Human Capital dan

Administrative Efficiency, yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan efisien meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan anggaran.

Berdasarkan penelitian ini, pemerintah Provinsi Aceh perlu terus meningkatkan PAD melalui beberapa usaha seperti peningkatan efisiensi pajak, diversifikasi sumber pendapatan, dan peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan DBH dan DAK yang efisien dan transparan juga menjadi hal wajib yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak maksimal terhadap pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Dan terakhir yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan belanja pegawai harus diarahkan pada pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan. Sumber daya manusia yang kompeten dan efisien akan mendukung pengelolaan proyek belanja modal dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S., & Halim, A. (2006). Studi atas belanja modal pada anggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan belanja pemeliharaan dan sumber pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2), 17–32.
- Astuty, S., Abdurrakhman, M. Z., & Paujjah, S. (2022). Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(3), 475–487.
- Darmayanti, A. (2024). Analisis pengaruh realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal terhadap kinerja instansi pemerintah sebelum dan masa pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 9(3), 247–256.
- Fiona, L., Taufik, T., & Ratnawati, V. (2016). Analisis kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah daerah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 232–247.
- Goryunov, E., Sinelnikov-Murylev, S., & Kotlikoff, L. J. (2015). Theoretical foundations of fiscal gap as a long-term fiscal sustainability indicator and its estimates for Russia (No. 0113).
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(3), 242–248.
- Ivana, D., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2).
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal kota dan kabupaten di Provinsi Bali (Doctoral dissertation, Udayana University).

- Mas'ud, M., & Sjarlis, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016–2020. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(2), 229–243.
- Mursita Wulandari, L. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal (Studi pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017–2019) (Doctoral dissertation, STIE AUB Surakarta).
- Nursita Wulandari, L. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal (Studi pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017–2019) (Doctoral dissertation, STIE AUB Surakarta).
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Pulau Jawa tahun 2013. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(1), 136–147.
- Rusdiyantoro, I., & Simanjuntak, R. A. (2022). Kesenambungan fiskal Indonesia pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 20–29.
- Sholikhah, I., & Wahyudin, A. (2014). Analisis belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Sianturi, H., & Putri, A. A. E. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Studi empiris pada pemerintahan daerah kabupaten/kota Provinsi Banten). *Jurnal Liabilitas*, 3(1), 1–19.
- Sriyana, J. (2011). Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas transfer fiskal di Indonesia. *Kontribusi Pendidikan Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi dalam Penguatan Perekonomian Bangsa*, 1, 71–98.
- Tiawon, H., & Hukom, A. (2020). Analisis kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 40–45.
- Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., & Sampford, C. (2008). Mekanisme dan penggunaan dana alokasi khusus (DAK). Lembaga penelitian SMERU.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55.
- Yamamoto, H., Garcia, L., & Chen, M. (2022). Workload analysis in public organizations: A scientific management approach. *Public Administration Quarterly*, 46(3), 289–306.